DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rokhim. 2013. *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State).* Malang; Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum FH Unisma Malang Edisi Pebruari-Mei 2013.

Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan,*Jakarta; Prenadamedia Group.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Naskah Akademik RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Chairul Saleh Dkk. 2006. *Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar.* Indonesian Center For Environmental Law (ICEL). Pontianak.

C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta; Balai Pustaka.

Fachruddin M Mangunjaya. 2017. *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Lingkungan.* Majelis Ulama Indonesia. Jakarta.

H. Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan kebijakan publik: analisis atas praktek hukum dan kebijakan publik dalam pembangunan sektor perekonomian di Indonesia.* (Universitas Sunan Giri Surabaya bekerjasama dengan Averoes Press). Surabaya.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum.* Yogyakarta; Mirra Buana Media. Jum

Aggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara.* Graha Ilmu.

Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Depok; Prenada Media.

KBBI edisi V. Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Philipus M. Hadjon. Wewenang, Makalah, Surabaya; Universitas Airlangga.

Philipus M. Hadjon. 2000. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.* Surabaya; Bina Ilmu.

Rachmat Trijono, 2015, *Penelitian Hak Menguasai Negara di Bidang Pertanahan*, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rasio Rido Sani (dkk). 2022, *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Direktorat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta.

Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta; Raja Grafindo Persada.

A Fathan. 2013. *Geografi Tumbuhan dan hewan.* Perbit Ombak; Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia,* Jakarta; Kompas.

Soerjono Soekanto. 2003. Pengantar Penelitian Hukum.Jakarta; Universitas Indonesia Press.

Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Indonesia.* cetakan ke-2. Sinargrafika. Jakarta; hlm.95

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta; Rineka Cipta.

Tim Penulis Perkumpulan SKALA. 2016. *Potret Perdagangan ilegal Satwa Liar Di Indonesia.* Jakarta; SKALA Partnersip for Sustanibilty.

Wiratno dkk. 2001. *Berkaca dicermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan Taman Nasional.* Jakarta; The Gibon Foundation.

W. Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Admninistrasi Negara.* Jakarta; Sinar Grafika.

Yusri Munaf. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Marphoyan Tujuh Publishing.

Zain Alam Setia. 2004. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Hukum Pidana.*Jakarta; Rineka Cipta.

JURNAL

Moh Gandara. 2020. *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat.* Khasana Hukum Vol. 2 No 3.

Proborini Hastuti. 2018, *Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa.* Kajian Putusan No. 30 P/HUM/2016T.

Jurnal faris Faisal Khamin. *pertanggungjawaban Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Terhadap Satwa Hasil Sitaan.*

Elisa Vionita Rajagukguk. 2014. *Efektivitas Peraturan Perdagangan Satwa Liar Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 31 No. 2.

Peraturan

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Admistrasi Pemerintahan

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi sumber Daya Alam Hayati Dan eksosistemnya

Undang-Undang No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indnesia No. 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.20 Tahun 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Peraturan menteri pemberdayaan dan aparatur Negara Reformasi birokrasi No. 21 Tahun 1990 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan No P.75/II/2014 Tentang Polisi Kehutanan

Kumupulan Wawancara

Muhammad Dahlan, Polisi Kehutanan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM), Wawancara pada 25 Agustus 2023

Simon, Pedagang Satwa Liar yang dilindungi, Wawancara 28 Agustus 2023. tanggal 25 agustus 2023.

Burhanuddin Polisi Kehutanan Resort Pelabuhan Soekarno Hatta dan Poetere, Wawancara Pada Tanggal 27 Agustus 2023

Jimmy, Polisi Hutan Resort Bandara Sultan Hasanuddin, Wawancara Pada tanggal 28 Agustus 2023

Hasyim, Pembeli Satwa Liar yang dilindungi, Wawancara pada tanggal 28 Agustus 2023.

Lukman. Pembeli satwa Liar yang Dilindungi. Wawancara pada 23 September 2023.

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **22836/S.01/PTSP/2023**

Lampiran : -

Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Sulsel
2. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 5533/UN4.5.1/PT.00/2023 tanggal 03 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: **SERLY**
Nomor Pokok	: B021171011
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

dpmptsp PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" WEWENANG POLISI KEHUTANAN DALAM MELINDUNGI SATWA LIAR DARI PERDAGANGANILEGAL DI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***04 Agustus s/d 04 September 2023***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 04 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 22836/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepadaBupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadatsetempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang suratizin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20230804863490

Catatan :
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*